

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI BARAT KALIMANTAN TIMUR (STUDI KASUS PADA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT KALIMANTAN TIMUR TAHUN
2011-2014)**

*THE FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS OF THE GOVERNMENT OFFICE OF
KUTAI BARAT REGENCY, KALIMANTAN TIMUR (CASE STUDY AT BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
KALIMANTAN TIMUR YEAR 2011-2014)*

Nanda Ertina Gabriella Mailoor¹, Paul David Elia Saerang², Harijanto Sabijono³

^{1,2,3}*Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115, Indonesia
E-mail: ¹nanda.mailoor@yahoo.co.id*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan BPKAD Kabupaten Kutai Barat menurut: (1) Analisis Pertumbuhan Pendapatan, (2) Analisis Rasio Keuangan, (3) Analisis Pertumbuhan Belanja, (4) Analisis Keserasian Belanja, dan (5) Rasio Efisiensi Belanja. Jenis penelitian dalam studi ini adalah Penelitian Asosiatif dan menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Kinerja Keuangan BPKAD Kabupaten Kutai Barat menunjukkan: pertumbuhan positif, pertumbuhan dalam kemampuan penyelenggaraan desentralisasi dan ketergantungan pada pemerintahan provinsi atau pemerintah daerah, nilai efektivitas PAD yang sangat efektif dan yang efektif, perubahan kinerja keuangan yang wajar dan tingkat pendapatan yang tinggi. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat harus mampu mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada dalam meningkatkan kinerja pemerintah dalam mengelola PAD.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Analisis Pertumbuhan Pendapatan, Analisis Rasio Keuangan, Analisis Pertumbuhan Belanja, Rasio Efisiensi Belanja.

ABSTRACT

This study aims to reveal the financial performance of BPKAD Kabupaten Kutai Barat based on: (1) Revenue Growth Analysis, (2) Financial Ratio Analysis, (3) Spending Growth Analysis, (4) Spending Accuracy Analysis, and (5) Spending Efficiency Ratio. The kind of research in this research is descriptive analysis method. Result shows that financial performance of BPKAD Kabupaten Kutai Barat has a positive growth, the growth in decentralization and dependency to province or regional government, very effective and efficient Regional Real Revenue PAD value, the reasonable changing in financial performance, and the high level of revenue from the existing revenue potential, in order to increase governmental performance in managing Regional Real Revenue PAD.

Keywords: Financial Performance, Revenue Growth Analysis, Financial Ratio Analysis, Spending Growth Analysis, Spending Efficiency Ratio.

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sehubungan dengan banyaknya perubahan dibidang ekonomi, social dan politik dalam era reformasi ini, berdampak pada percepatan perubahan perilaku masyarakat, terutama yang berkaitan dengan tuntutan masyarakat dengan adanya transparasi pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah, demokratisasi dalam pengambilan keputusan, pemberian pelayanan oleh pemerintah yang lebih berorientasi pada kepuasan masyarakat dan penerapan hukum secara konsekuen. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah memberlakukan undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sejak bulan Januari tahun 2001 yang sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan daerah yang lebih besar. Dengan tingkat kemandirian keuangan yang lebih besar berarti daerah tidak akan lagi sangat tergantung pada bantuan dari pemerintah pusat dan propinsi melalui dana perimbangan namun tidak berarti jika kemandirian keuangan daerah tinggi, maka daerah sudah tidak perlu lagi mendapatkan dana perimbangan. Dana perimbangan masih tetap diperlukan untuk mempercepat pembangunan di daerah.

Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 pasal 3 meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD. Pengelolaan keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan bermanfaat untuk masyarakat.

Tujuan Peneliti

1. Kinerja keuangan BPKAD Kabupaten Kutai Barat menurut Analisis Pertumbuhan Pendapatan.
2. Kinerja keuangan BPKAD Kabupaten Kutai Barat menurut Analisis Rasio Keuangan (Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah).
3. Kinerja keuangan BPKAD Kabupaten Kutai Barat menurut Analisis Pertumbuhan Belanja.
4. Kinerja keuangan BPKAD Kabupaten Kutai Barat menurut Analisis Keresasian Belanja (Analisis Belanja Operasi Terhadap Total Belanja dan Analisis Belanja Modal Terhadap Total Belanja).
5. Kinerja keuangan BPKAD Kabupaten Kutai Barat menurut Rasio Efisiensi Belanja.

Tinjauan Pustaka

Pengertian Akuntansi

Accounting Principle Board Statement (APBS) No. 4 Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang berfungsi untuk memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu

badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, yang digunakan dalam memilih di antara beberapa alternative, Menurut Mahmudi (2011).

Pengertian APBD

Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Permendagri No.13 Tahun 2006). Dengan demikian APBD merupakan alat/wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan dan program dimana pada saat tertentu manfaatnya benar-benar akan dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, DPRD dan pemerintah daerah harus selalu berupaya secara nyata dan terstruktur untuk menghasilkan suatu APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat atas dasar potensi masing-masing daerah serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasikan kepentingan dan akuntabilitas publik. Suatu anggaran yang telah direncanakan dengan baik, sehingga baik tujuan maupun sasaran akan dapat tercapai secara berdayaguna dan berhasil guna.

Pengertian Laporan Realisasi Anggaran

Secara sederhana laporan realisasi anggaran merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Laporan realisasi anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat atau daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN atau APBD. Menurut Rudianto (2009) Laporan realisasi anggaran adalah Rencana kegiatan keuangan yang berisi perkiraan belanja yang diusulkan dalam satu periode dan sumber pendapatan yang diusulkan untuk membiayai belanja tersebut.

Otonomi Daerah

Pengertian otonomi daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Istilah otonomi daerah bukan hal yang baru bagi bangsa dan negara RI sebab sejak Indonesia merdeka sudah dikenal dengan Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID), yaitu lembaga yang menjalankan pemerintahan daerah dan melaksanakan tugas mengatur rumah tangga daerahnya. Menurut Widjaja (2009), menyatakan bahwa Otonomi daerah ialah salah satu bentuk dari desentralisasi suatu pemerintahan yang dasarnya ditujukan guna untuk memenuhi suatu kepentingan bangsa secara menyeluruh, ialah suatu upaya yang lebih mendekatkan berbagai tujuan untuk penyelenggaraan pemerintahan sehingga dapat mewujudkan suatu cita-cita masyarakat yang adil dan makmur.

Kinerja Keuangan

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan adalah dengan melaksanakan analisis rasio terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim dan Kusufi, 2008). Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan swasta (Halim dan Kusufi, 2008).

Analisis Pertumbuhan Pendapatan

Analisis pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan secara positif ataukah negatif. Tentunya diharapkan pertumbuhan pendapatan tersebut positif dan kecenderungannya (*trend*) meningkat. Sebaliknya jika terjadi pertumbuhan yang negatif maka hal itu harus dicari penyebab penurunannya, apakah karena faktor ekonomi makro yang di luar kendali pemerintah daerah atau karena manajemen keuangan daerah yang kurang baik.

Analisis Rasio Keuangan

1. Derajat Desentralisasi. Derajat Desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.
2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh pemerintah daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.
3. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah. Rasio Efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan).

Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik. Alasan kenaikan belanja biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflasi, perubahan kurs rupiah, perubahan jumlah cakupan layanan dan penyesuaian faktor makro ekonomi

Analisis Keserasian Belanja

Analisis Keserasian Belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antarbelanja. Hal ini terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi. Fungsi anggaran tersebut akan berjalan dengan baik, maka pemerintah daerah perlu membuat harmonisasi belanja.

1. Analisis Belanja Operasi Terhadap Total Belanja
2. Analisis Belanja Modal Terhadap Total Belanja

Rasio Efisiensi Belanja

Rasio Efisiensi Belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah.

2. METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data penelitian yang digunakan adalah data kuantitatif. Menurut Sugiyono (2012) dikatakan metode kuantitatif data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Sumber yang digunakan adalah data sekunder ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan dan disatukan dari berbagai sumber, yang berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi.

Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Bupati Kutai Barat Kalimantan Timur khususnya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan data sekunder dengan mengumpulkan data dengan cara mempelajari catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang ada pada instansi yang diteliti dengan menggunakan metode dokumentasi. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif yaitu melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan peneliti. Dan data khusus berupa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat tahun anggaran 2011-2014.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang akan digunakan adalah sebagai berikut :

1. Analisis Pertumbuhan Pendapatan.
2. Analisis Rasio Keuangan
 1. Derajat Desentralisasi
 2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
 3. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah
3. Analisis Pertumbuhan Belanja.
4. Analisis Kecerassian Belanja
 1. Analisis Belanja Operasi Terhadap Total Belanja.
 2. Analisis Belanja Modal Terhadap Total Belanja.
5. Rasio Efisiensi Belanja.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Analisis Pertumbuhan Pendapatan

Rumus untuk menghitung Pertumbuhan Pendapatan adalah :

$$\begin{aligned} & \text{Pertumbuhan Pendapatan Tahun } t \\ &= \frac{\text{Pendapatan Tahun } t - \text{Pendapatan Tahun } (t - 1)}{\text{Pendapatan Tahun } (t - 1)} \times 100\% \end{aligned}$$

Dalam penelitian ini terdapat dua model perhitungan analisis Pertumbuhan Pendapatan, yaitu Analisis Pertumbuhan Pendapatan Anggaran Pendapatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat dan Analisis Pertumbuhan Pendapatan Realisasi Anggaran Pendapatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Tabel 1. Nilai Pertumbuhan Anggaran

No.	Periode	Pertumbuhan Anggaran Pendapatan (%)	Keterangan
1	Tahun 2012	15,046	Positif
2	Tahun 2013	15,525	Positif
3	Tahun 2014	9,865	Positif

Sumber: Data Olahan, 2016.

Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai Pertumbuhan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat menunjukkan pertumbuhan positif, walaupun terdapat penurunan dari periode Tahun 2013 ke periode Tahun 2014.

Tabel 2. Nilai Pertumbuhan Realisasi Anggaran

No.	Periode	Pertumbuhan Realisasi Anggaran Pendapatan (%)	Keterangan
1	Tahun 2012	16,741	Positif
2	Tahun 2013	17,332	Positif
3	Tahun 2014	8,609	Positif

Sumber: Data Olahan 2016

Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai Pertumbuhan Realisasi Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat menunjukkan pertumbuhan positif, walaupun terdapat penurunan dari periode Tahun 2013 ke periode Tahun 2014.

Rasio Derajat Desentralisasi

Rumus untuk menghitung Derajat Desentralisasi adalah :

$$D = \frac{P}{T} \times \frac{A}{P} \times \frac{D}{D} \times \frac{h}{h} \times 100\%$$

Dalam penelitian ini terdapat dua model perhitungan analisis Derajat Desentralisasi, yaitu Analisis Derajat Desentralisasi Anggaran Pendapatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat dan Analisis Derajat Desentralisasi Realisasi Anggaran Pendapatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Tabel 3. Nilai Derajat Desentralisasi Anggaran

No.	Periode	Derajat Desentralisasi APB (%)	Ketrangan
1	Tahun 2011	3,136	Mampu
2	Tahun 2012	3,639	Mampu
3	Tahun 2013	5,466	Mampu
4	Tahun 2014	6,556	Mampu

Sumber: Data Olahan 2016

Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai Derajat Desentralisi Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat menunjukkan pertumbuhan dalam kemampuan penyelenggaraan desentralisasi.

Tabel 4. Nilai Derajat Desentralisasi Realisasi Anggaran

No.	Periode	Derajat Desentralisasi Realisasi APB (%)	Keterangan
1	Tahun 2011	3,511	Bergantung
2	Tahun 2012	3,491	Bergantung
3	Tahun 2013	5,737	Bergantung
4	Tahun 2014	7,106	Bergantung

Sumber: Data Olahan 2016

Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai Derajat Desentralisasi Realisasi Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat menunjukkan pertumbuhan ketergantungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat dalam kemampuan mampu penyelenggaraan desentralisasi.

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat.

$$R = \frac{K}{D} \times 100\%$$

Dalam penelitian ini terdapat dua model perhitungan analisis Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, yaitu Analisis Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Anggaran Pendapatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat dan Analisis Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Realisasi Anggaran Pendapatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Tabel 5. Nilai Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

No.	Periode	Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah	Keterangan
1	Tahun 2011	77,982	Bergantung
2	Tahun 2012	86,277	Bergantung
3	Tahun 2013	85,78	Bergantung
4	Tahun 2014	84,624	Bergantung

Sumber: Data Olahan 2016

Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Anggaran Pendapatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat menunjukkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat tergantung pada pemerintah provinsi atau pemerintah daerah, walaupun terdapat penurunan pada periode Tahun 2012 ke periode Tahun 2013 dan periode Tahun 2013 ke periode Tahun 2014.

Tabel 6. Nilai Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Realisasi

No.	Periode	Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah	Keterangan
1	Tahun 2011	77,548	Bergantung
2	Tahun 2012	86,456	Bergantung
3	Tahun 2013	87,048	Bergantung
4	Tahun 2014	84,13	Bergantung

Sumber: Data Olahan 2016

Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Realisasi Pendapatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat menunjukkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat tergantung pada pemerintah provinsi atau pemerintah daerah, walaupun terdapat penurunan pada periode Tahun 2012 ke periode Tahun 2013 dan periode Tahun 2013 ke periode Tahun 2014.

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rumus untuk menghitung Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah adalah :

$$R E P = \frac{R P_t P A D}{T P_t P} h \times 100\%$$

Dalam penelitian ini terdapat satu model perhitungan analisis Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, yaitu Analisis Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Tabel 7. Nilai Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

No.	Periode	Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah	Keterangan
1	Tahun 2011	109,368	Sangat Efektif
2	Tahun 2012	95,331	Efektif
3	Tahun 2013	105,935	Sangat Efektif
4	Tahun 2014	108,149	Bergantung

Sumber: Data Olahan 2016

Tabel 7 menunjukkan bahwa nilai Efektivitas Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat menunjukkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat mempunyai nilai efektivitas Pendapatan Asli Daerah yang Sangat Efektif pada periode Tahun 2011 dan periode Tahun 2013 dan nilai efektivitas Pendapatan Asli Daerah yang Efektif pada periode Tahun 2012 dan periode Tahun 2014.

Analisis Pertumbuhan Belanja

Rumus untuk menghitung Pertumbuhan Belanja adalah:

$$P h a B T h u t = \frac{R B T h u t - R B T h u (t - 1)}{R B T h u (t - 1)}$$

Dalam penelitian ini terdapat satu model perhitungan analisis Pertumbuhan Belanja, yaitu Analisis Pertumbuhan Belanja Anggaran Pendapatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Tabel 8. Nilai Pertumbuhan Belanja

No.	Periode	Pertumbuhan Belanja	Keterangan
1	Tahun 2012	12,722	Wajar
2	Tahun 2013	14,049	Wajar
3	Tahun 2014	8,59	Wajar

Sumber: Data Olahan 2016

Tabel 8 menunjukkan bahwa nilai Pertumbuhan Belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat menunjukkan perubahan yang wajar.

Analisis Keserasian Belanja

1. Analisis Belanja Operasi Terhadap Total Belanja

Rumus untuk menghitung Belanja Operasi Terhadap Total Belanja adalah:

$$R \ B \ O \ T \ h \ a \ T \ B = \frac{R \ B \ O}{T \ B \ D \ h} \times 100\%$$

Dalam penelitian ini terdapat satu model perhitungan analisis Belanja Operasi Terhadap Total Belanja, yaitu Analisis Belanja Operasi Terhadap Total Belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Tabel 9. Nilai Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja

No.	Periode	Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja	Keterangan
1	Tahun 2011	92,199	Tingkat Pendapatan Tinggi
2	Tahun 2012	94,194	Tingkat Pendapatan Tinggi
3	Tahun 2013	93,12	Tingkat Pendapatan Tinggi
4	Tahun 2014	93,912	Tingkat Pendapatan Tinggi

Sumber: Data Olahan 2016

Tabel 9 menunjukkan bahwa nilai Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat menunjukkan tingkat pendapatan yang tinggi, walaupun terjadi penurunan nilai dari periode Tahun 2012 ke Tahun 2013.

2. Analisis Belanja Modal Terhadap Total Belanja

Rumus untuk menghitung Belanja Modal Terhadap Total Belanja adalah:

$$R \ B \ M \ T \ h \ a \ T \ B = \frac{R \ B \ M}{T \ B \ D \ h}$$

Dalam penelitian ini terdapat satu model perhitungan analisis Belanja Modal Terhadap Total Belanja, yaitu Analisis Belanja Modal Terhadap Total Belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Tabel 10. Nilai Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja

No.	Periode	Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja	Keterangan
1	Tahun 2011	21,385	Tingkat Pendapatan Tinggi
2	Tahun 2012	23,335	Tingkat Pendapatan Tinggi
3	Tahun 2013	22,875	Tingkat Pendapatan Tinggi
4	Tahun 2014	22,498	Tingkat Pendapatan Tinggi

Sumber: Data Olahan 2016

Tabel 10 menunjukkan bahwa nilai Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat menunjukkan tingkat pendapatan yang tinggi, walaupun terjadi penurunan nilai dari periode 2012 ke 2013 dan periode 2013 ke 2014.

Rasio Efisiensi Belanja

Rumus untuk menghitung Rasio Efisiensi Belanja adalah:

$$R \ E \ B = \frac{R \ B}{A \ B} \times 100\%$$

Dalam penelitian ini terdapat satu model perhitungan analisis Rasio Efisiensi Belanja, yaitu Analisis Rasio Efisiensi Belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Tabel 11. Nilai Rasio Efisiensi Belanja

No.	Periode	Rasio Efisiensi Belanja	Keterangan
1	Tahun 2011	92,199	Efisiensi Anggaran
2	Tahun 2012	94,194	Efisiensi Anggaran
3	Tahun 2013	93,12	Efisiensi Anggaran
4	Tahun 2014	93,912	Efisiensi Anggaran

Sumber: Data Olahan 2016

Tabel 11 menunjukkan bahwa nilai Rasio Efisiensi Belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat menunjukkan tingkat pendapatan yang tinggi, walaupun terjadi penurunan nilai dari periode Tahun 2012 ke Tahun 2013 dan periode Tahun 2013 ke Tahun 2014.

4. PENUTUP

Kesimpulan

1. Kinerja keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kutai Barat menurut analisis Pertumbuhan Pendapatan menunjukkan nilai Pertumbuhan Anggaran dan Pertumbuhan Realisasi Anggaran menunjukkan pertumbuhan positif.
2. Kinerja keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kutai Barat menurut analisis Rasio Keuangan menunjukkan bahwa:
 1. Kinerja keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kutai Barat menurut Derajat Desentralisasi pada Anggaran dan Realisasi Anggaran menunjukkan pertumbuhan dalam kemampuan penyelenggaraan desentralisasi.
 2. Kinerja keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kutai Barat menurut Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah menunjukkan ketergantungan pada pemerintah provinsi atau pemerintah daerah.
 3. Kinerja keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kutai Barat menurut Efektivitas Pendapatan Asli Daerah bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat mempunyai nilai efektivitas Pendapatan Asli Daerah yang Sangat Efektif dan yang Efektif.
3. Kinerja keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat (BPKAD) Kabupaten Kutai Barat menurut analisis Pertumbuhan Belanja menunjukkan perubahan kinerja keuangan yang wajar.
4. Kinerja keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat (BPKAD) Kabupaten Kutai Barat menurut Analisis Keserasian Belanja menunjukkan bahwa:
 1. Kinerja keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat (BPKAD) Kabupaten Kutai Barat menurut Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat menunjukkan tingkat pendapatan yang tinggi.
 2. Kinerja keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat (BPKAD) Kabupaten Kutai Barat menurut Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja menunjukkan tingkat pendapatan yang tinggi.
5. Kinerja keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat (BPKAD) Kabupaten Kutai Barat menurut Rasio Efisiensi Belanja menunjukkan Rasio Efisiensi Belanja menunjukkan tingkat pendapatan yang tinggi.

Saran

Dari hasil analisis dan pembahasan diatas yang sudah diuraikan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat harus mampu mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada dalam meningkatkan kinerja Pemerintah dalam mengelola pendapatan asli daerah (PAD) dengan mencari alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk mengatasi kekurangan pembiayaan dan menggali potensi baru atau mengembangkan potensi-potensi yang sudah ada.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan bisa meningkatkan lagi penelitian yang berhubungan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- [1] Abdul, Halim dan Syam, Kusufi. 2008. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- [2] Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*, Cetakan Pertama, Yogyakarta. UUI Press.
- [3] Mahmudi. 2016. "*Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*", Edisi Ketiga UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- [4] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah*.
- [5] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- [6] Rudianto. 2009. *Penganggaran*. Jakarta: Erlangga.
- [7] Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung. Pusat Bahasa Depdiknas.
- [8] Widjaja. 2009. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.